

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan kerap kali mengalami pasang surut. Secara geografis, kawasan Pasifik Selatan terletak di bagian timur Indonesia dan berdekatan langsung dengan Papua Nugini. Kawasan Pasifik Selatan meliputi tiga ras utama antara lain Melanesia, Mikronesia, Polinesia. Indonesia dalam melihat kawasan Pasifik masih dipandang sebagai “halaman belakang” sehingga orientasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kawasan tersebut belum aktif. Namun hal tersebut berubah ketika negara-negara di kawasan Pasifik Selatan menyuarkan isu hak asasi manusia yang dialami masyarakat Papua Barat di panggung internasional.

Negara yang menyuarkan isu Papua Barat antara lain adalah negara di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki kesamaan ras dengan masyarakat di Papua Barat yakni Melanesia. Negara tersebut antara lain adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, Fiji, dan Papua Nugini. Isu kemerdekaan Papua Barat pertama kali disuarakan oleh Vanuatu pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-68 pada 28 September 2013, yang memfokuskan pada tidak terpenuhinya hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat (The Republic of Vanuatu Statement for The United Nations, 2013). Kepulauan Solomon menyuarkan isu hak asasi manusia dan kemerdekaan Papua Barat pada sidang Majelis Umum PBB ke-70, pada 1 Oktober 2015, yang menekankan pada sikap pemerintah Indonesia yang melanggar hak asasi manusia bagi masyarakat Papua Barat (Solomon Islands for The United Nations, 2015). Kaledonia Baru melalui Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS) yang juga merupakan partai penggerak kemerdekaan Kaledonia Baru ikut mendukung kemerdekaan Papua Barat dengan adanya kesamaan perjuangan bagi FLNKS yang ingin merdeka dari

Perancis. Namun di lain sisi Fiji dan Papua Nugini mendukung dan menghormati kedaulatan Indonesia dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri.

Pada Desember 2014, Vanuatu menjadi tuan rumah pembentukan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) sebagai grup pergerakan kemerdekaan yang menaungi beberapa organisasi kemerdekaan Papua Barat lainnya seperti *Federal Republic of West Papua* (NRFPB), *National Coalition for Liberation* (WPNCL), dan *West Papua National Parliament* (PNWP) (United Liberation Movement for West Papua, 2020). ULMWP kian melebarkan sayapnya dengan menjadi *Observer Member* di *Melanesian Spearhead Group* (MSG). MSG adalah sebuah organisasi sub-regional di kawasan Pasifik Selatan dengan beranggotakan negara-negara di Pasifik Selatan yaitu Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, Papua Nugini, dan FLNKS. Organisasi ini dibentuk atas dasar upaya dekolonisasi masyarakat Melanesia agar mendapat kemerdekaan penuh (MSG, 2021). Sebagai *Observer Member* di MSG, ULMWP hanya memiliki wewenang untuk menyampaikan pernyataan jika diminta oleh Direktur Jenderal Sekretariat MSG dan tidak memiliki akses terhadap dokumen yang bersifat *confidential* (Kemlu, 2019).

Tidak hanya tinggal diam, pemerintah Indonesia mulai melakukan pendekatan-pendekatan terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Pada 2015, Indonesia menjadi *Associate Member* di MSG dimana Indonesia memiliki akses terhadap dokumen yang bersifat *confidential* dan memiliki kewajiban memberi kontribusi tahunan pada Sekretariat MSG (Kemlu, 2019). Diterimanya Indonesia dalam MSG dikarenakan adanya ras Melanesia yang tersebar di wilayah Indonesia Timur yang terpusat di Papua (Wyeth, 2018). Tidak sampai di situ, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dengan menggunakan inisiatif *Pacific Elevation*. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan pada pembukaan acara *Pacific Exposition* 2019 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi (Kumparan, 2020). Simak pernyataannya sebagai berikut: “*We are creating a momentum to engage each*

*other and strengthen our fraternity with fellow Pacific countries and territories... This is a new era of Pacific partnership. A Pacific Elevation*". Inisiatif tersebut dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan khususnya terhadap Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, Fiji, dan Papua Nugini. *Pacific Elevation* adalah komitmen Indonesia untuk membantu negara atau teritori Pasifik melalui berbagai bentuk kerja sama bilateral dan *regional* serta adanya bantuan langsung (Kemlu, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan pendekatan Indonesia terhadap negara-negara di Pasifik Selatan melalui kebijakan *Pacific Elevation* guna menghentikan dukungan negara-negara di Pasifik Selatan terhadap gerakan separatis di Papua Barat. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mirip penelitian penulis mengenai hubungan antara Indonesia, kawasan Pasifik Selatan, dan gerakan separatis di Papua Barat. Muhammad Fadillah yang merupakan alumni mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, meneliti tentang "Inkonsistensi Kebijakan Luar Negeri *Melanesian Spearhead Group* dalam isu Papua: Studi Kasus Papua Nugini dan Fiji" (Fadhilah, 2019). Penelitian ditulis untuk kepentingan memenuhi kewajiban skripsi. Dalam penelitian tersebut, Fadilah tidak membahas secara spesifik *Pacific Elevation* sebagai pendekatan terhadap negara di kawasan Pasifik Selatan melainkan lebih terhadap permasalahan internal di MSG dalam isu Papua. Kemudian M. Syaprin Zahidi yang merupakan dosen Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang yang meneliti "*The Melanesian Spearhead Group in terms of Indonesia's interest*" (Zahidi-MA, 2018). Penelitian tersebut dilakukan untuk kepentingan tesis yang dipublikasikan di jurnal Polandia, *Przegląd Politologiczny*. Penelitian ini membahas mengenai kepentingan Indonesia di MSG dengan tujuan meningkatkan stabilitas domestik dari adanya gerakan separatis di Papua. Namun penelitian tersebut tidak membahas *Pacific Elevation* sebagai strategi pendekatan Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Kemudian terdapat Jim Elmslie yang melakukan penelitian dengan judul

“*Indonesian Diplomatic Manuvering in Melanesia: Challenges and Opportunities*” dalam buku *Regionalism, Security & Cooperation in Oceania* (Cramer, 2015). Penelitian ini membahas usaha ULMWP yang berusaha bergabung dalam MSG yang kemudian ditentang oleh Indonesia

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis menarik sebuah rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut :

- 1) Bagaimana pengaruh strategi pemerintah Indonesia, *Pacific Elevation*, terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka menghentikan gerakan separatis di Papua Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dukungan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan terhadap kelompok separatis di Papua Barat. Selain itu juga mengetahui bentuk-bentuk kebijakan *Pacific Elevation* dan dampak dari strategi pemerintah Indonesia, *Pacific Elevation*, terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam menghentikan gerakan separatis Papua Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka tulisan ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis : Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri yang mengaplikasikan konsep *soft power* dalam menganalisa sebuah kasus. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi berikutnya yang akan membahas mengenai isu *Pacific Elevation* dan bagaimana pengaruhnya terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam upaya menghentikan gerakan separatis di Papua Barat.
- b. Manfaat Akademis : Penelitian ini diharapkan menjadi sarana dan wadah yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan

penulis khususnya terhadap topik penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang lebih luas serta dapat membantu dalam pengembangan riset di Universitas.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Kebijakan Luar Negeri**

Dunia internasional makin terintegrasi setelah adanya perjanjian Westphalia dan perang dunia pertama dan kedua usai. Banyak wilayah yang mendeklarasikan kemerdekaannya dan terbentuk sebuah negara. Interaksi antar negara pun kian meningkat dalam hal kerja sama untuk dan adanya hubungan timbal balik antar negara. Dengan demikian istilah ‘kebijakan luar negeri’ mulai muncul sebagai tujuan untuk menentukan arah, keputusan, strategi, dan menentukan tujuan interaksi suatu negara dengan negara lain (David Held, 2000, pp. 14-28).

Menurut George Modelski, dalam bukunya “*A Theory of Foreign Policy*”, kebijakan luar negeri adalah sebuah sistem aktivitas yang dibentuk dan dikembangkan oleh sebuah komunitas untuk mengubah perilaku negara lain dan dapat menyesuaikan dengan aktivitas mereka dengan dunia internasional (Modelski, 1962, pp. 6-9). Modelski menekankan bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara mampu menjelaskan bagaimana sebuah negara berusaha untuk mengubah perilaku negara lain dan dapat mengubah perilaku negara lain. Dalam hal ini tujuan utama dari kebijakan luar negeri adalah untuk mengubah perilaku negara lain. Dengan mengubah perilaku negara lain, maka kebijakan luar negeri dapat dikatakan berhasil dan sesuai dengan tujuan kepentingan nasional sebuah negara.

Kebijakan luar negeri terdiri dari sebuah keputusan dan tindakan dengan melibatkan hubungan antara satu negara dengan negara lain (Frankel, 1963, p.231). Serangkaian keputusan dan tindakan tersebut terdiri dari perumusan dan implementasi sebuah gagasan yang dirancang, namun di lain sisi negara melakukan interaksi dengan negara lain untuk

mempertahankan dan meningkatkan hubungan. Definisi lain mengatakan kebijakan luar negeri adalah perihal bagaimana negara berurusan dengan lingkungan eksternal, sehingga kebijakan luar negeri merupakan hasil dari sebuah negara menerjemahkan tujuan dan kepentingan yang dipahami secara luas yang nantinya untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara itu sendiri (Padelford, Lincoln, & Olvey, 1976, pp. 381-382). Dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri memiliki keterkaitan dengan lingkungan eksternal sebuah negara itu sendiri, dan merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan.

#### 1.5.2 *Soft Power*

*Power* menjadi salah satu faktor penentu posisi tawar sebuah negara dalam hubungan internasional. Banyak negara berusaha meningkatkan kekuatannya melalui berbagai bidang seperti militer hingga kebudayaannya. *Power* adalah kemampuan untuk mengubah perilaku orang lain untuk mendapatkan apa yang kita mau (Nye, 2006). Dalam hal ini mengubah perilaku yang dimaksud adalah mengubah cara pandang negara lain sehingga dapat memenuhi kepentingan nasional sebuah negara itu sendiri. Bentuk kekuatan ini berusaha memanipulasi dengan merubah apa yang mereka mau. Mudahnya, kemampuan aktor A untuk membuat aktor B melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan aktor B yaitu dengan mempengaruhi preferensi dan keinginan atau pemikiran (Lukes, 2005, p.88).

Salah satu bentuk *power* adalah *soft power* yang dimaknai sebagai sebuah kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita mau melalui daya tarik alih alih koersi atau ganjaran (Nye, 2004, p.7). Menurut Nye sumber *soft power* paling dasar antara lain berasal dari budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri (Nye, 2008, p.95). Namun lebih dari itu, sumber *soft power* dapat melalui kebijakan pemerintah di bidang budaya, diplomasi, pendidikan, dan bisnis atau inovasi (McClory, 2011, p.10).

Dalam berbagai sumber *soft power*, penulis menggunakan budaya dan kebijakan luar negeri dalam menganalisa permasalahan. Unsur

kebudayaan serta nilai-nilai budaya sebuah negara dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan posisi tawar terhadap negara lain. Adanya persamaan budaya terhadap negara lain mampu membuat persepsi baik yang kemudian kepentingan nasional dapat terpenuhi. Kemudian terdapat kebijakan luar negeri, yang mana dibutuhkan legitimasi serta otoritas moral untuk memaksimalkan kekuatan tersebut. Salah satu bentuk dari kebijakan luar negeri dapat melalui diplomasi serta pemberian bantuan ekonomi yang dapat berupa bantuan secara langsung atau melalui kerja sama bisnis terhadap negara lain. Dengan adanya pemberian bantuan ekonomi ke negara lain maka sebuah negara dapat membuat komitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara lain, maka dari itu negara akan mendapat citra terhadap negara lain (Gallarotti, 2011, p.32).

Dalam penelitian ini, penulis melihat Indonesia dalam upaya menghentikan gerakan separatis di Papua Barat melalui kebijakan luar negerinya yaitu *Pacific Elevation* yang berupa kebijakan *soft power*. Dengan kebijakan luar negeri tersebut Indonesia mampu menghentikan dukungan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan terhadap gerakan separatis Papua Barat. *Pacific Elevation* berupa kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan pada pendekatan *soft power*, berupa kerja sama di berbagai sektor dan bantuan secara langsung.

## **1.6 Hipotesis**

Isu separatis Papua Barat menjadi tugas rumah bagi pemerintahan Joko Widodo. Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan kerap kali menyuarakan isu separatis di Papua Barat dengan dasar adanya pelanggaran hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri. Baik melalui organisasi internasional, organisasi regional, hingga antar negara, isu separatis digaungkan melalui beragam media. Indonesia tidak hanya diam. Berbagai pendekatan dilakukan demi menjaga kedaulatan nasionalnya. Walaupun Indonesia telah menjadi *associate member* di MSG, tidak cukup untuk menghentikan negara anggota MSG lainnya untuk berhenti menyuarakan isu kemerdekaan Papua Barat. Melihat fenomena tersebut, Indonesia melakukan

strategi baru yaitu *Pacific Elevation* yang merupakan komitmen Indonesia untuk membantu negara atau teritori Pasifik melalui berbagai bentuk kerja sama bilateral dan *regional* serta adanya bantuan langsung. Kebijakan luar negeri tersebut diperkirakan dapat menghentikan dukungan negara-negara kawasan Pasifik Selatan terhadap isu separatis Papua Barat.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Definisi Konseptual**

#### **1.7.1.1 Gerakan Separatis**

Gerakan separatis adalah tindakan-tindakan yang bertujuan melepaskan suatu daerah atau wilayah dari satu negara yang merdeka dan berdaulat dengan berbagai macam cara, daya, dan upaya guna mencapai tujuan utama mereka yakni pemisahan daerah atau wilayah tertentu dimaksud agar lepas dari negara induknya (Hamid, 2001, p.8).

Pengertian lainnya dari *Cambridge Dictionary*, separatisme adalah kepercayaan yang dipegang oleh orang dari ras, agama, atau kelompok tertentu dalam suatu negara bahwa mereka harus merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri atau dengan cara tertentu hidup terpisah dari orang lain.

Maka disimpulkan bahwa gerakan separatis adalah tindakan sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari negara dan ingin memiliki negara sendiri yang merdeka.

#### **1.7.1.2 *Pacific Elevation***

*Pacific elevation* adalah komitmen Indonesia untuk membantu negara atau teritori Pasifik melalui berbagai bentuk kerjasama bilateral dan regional serta adanya bantuan langsung (Kemlu, 2020). *Pacific Elevation* mulai diperkenalkan secara langsung oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada pembukaan acara *Pacific Exposition 2019* di Auckland, Selandia Baru. *Pacific elevation* dapat dimaknai sebagai upaya Indonesia secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengkokohkan



persahabatan dan kemitraan dengan berbagai mitranya di kawasan Pasifik (Kumparan, 2020). Kebijakan ini ditempuh Indonesia untuk meningkatkan *engagement* atau keterikatan dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Sektor pelaksanaan dari kebijakan *pacific elevation* meliputi sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bentuk dari kebijakan ini tercermin dalam beberapa bentuk yakni *Pacific Exposition*, *Foreign Trade Agreements*, *Indonesia Aid*, dan bantuan ekonomi langsung.

## **1.7.2 Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.2.1 Gerakan Separatis**

Berdasarkan definisi konseptual, maka dapat dikatakan gerakan separatis apabila adanya upaya oleh sebuah kelompok yang berusaha memisahkan diri dari negara dengan bantuan dari negara lain hingga organisasi internasional. Pada penelitian ini gerakan separatis yang dimaksud adalah gerakan oleh kelompok ULMWP yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara Papua Barat. Gerakan separatis dilatar belakangi oleh adanya semangat kedaerahan (sukuisme) yang sangat kuat dan adanya propaganda atau intervensi asing yang secara terlihat maupun tidak terlihat. Adanya ketimpangan antara masyarakat Papua dan masyarakat di daerah Indonesia lain, membuat keinginan untuk memisahkan diri semakin kuat Gerakan separatis dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan dengan kekerasan yang dapat mengganggu kredibilitas pemerintah yang berdaulat.

### **1.7.2.2 *Pacific Elevation***

Berdasarkan definisi konseptual, maka dapat dikatakan *Pacific Elevation* adalah kebijakan pemerintah Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan *engagement* atau keterikatan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka menghentikan gerakan separatis di Papua Barat. Kebijakan ini difokuskan terhadap

negara-negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, Fiji, dan Papua Nugini. Hal tersebut dikarenakan kelima negara tersebut mayoritas masyarakatnya adalah ras Melanesia, di mana mereka memiliki kesamaan dengan masyarakat di Papua yakni Melanesia.

### **1.8 Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif – eksplanatif. Penelitian ini tidak sekedar menggambarkan secara apa adanya gejala-gejala atau keadaan dalam masyarakat akan tetapi juga mengkaji hubungan sebab-akibat di antara dua gejala atau lebih tersebut (Sodik, 2015). Peneliti akan membandingkan antara teori yang digunakan dengan fenomena di lapangan sehingga dapat mengetahui benar atau tidaknya hipotesa peneliti.

### **1.9 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini adalah sejak kebijakan *Pacific Elevation* diperkenalkan dari bulan Juni tahun 2019 hingga bulan Mei tahun 2021. Penelitian ini memfokuskan kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan antara lain Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, Fiji, dan Papua Nugini.

### **1.10 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan buku, jurnal, dan *online research* untuk melengkapi data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data melalui penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal, reportase yang berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan terkait isu kemerdekaan Papua Barat.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang paham masalah penelitian ini. Selain wawancara, penulis mengambil data primer melalui sumber laman resmi pemerintah negara, dokumen resmi negara, dan organisasi internasional.

### **1.11 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif yang berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian. Pada prinsipnya analisis data kualitatif berproses secara induktif, interpretasi, dan konseptualisasi (Hamidi, 2004, pp. 95-96). Dalam analisis data kualitatif terdapat tiga jalur dalam menganalisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 1992, p.10). Dalam reduksi data ini dilakukan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada di lapangan. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh dan memastikan data yang diolah merupakan data yang mencakup jangkauan penelitian. Selanjutnya penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Kemudian tahap akhir dalam proses analisis data adalah kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

### **1.12 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab. Bab I adalah pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang permasalahan dari penelitian ini dengan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II akan membahas pembahasan *Pacific Elevation* serta bentuk-bentuk pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam upaya menghentikan gerakan separatis di Papua Barat. Bab III akan membahas analisa dampak dari *Pacific Elevation* terhadap dukungan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Bab IV merupakan kesimpulan dari penelitian ini sesuai atau tidak sesuai dengan hipotesis yang telah diberikan di awal penelitian, serta menambahkan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya

